

RESUME

Australia adalah sebuah negara yang terdapat di belahan bumi bagian selatan yang juga merupakan benua terkecil di dunia. Di sebelah barat Australia berbatasan dengan Indonesia dan Papua New Guinea, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Solomon, Fiji dan Selandia Baru. Meskipun Australia terletak didekat Asia, namun negara ini sering disebut sebagai bagian dari Dunia Barat. Jika di lihat dari sejarah Australia maka negara ini memiliki persamaan hidup dan budaya yang sama dengan bangsa barat terutama Kerajaan Inggris karena sebelum terbentuk federasi Australia, Australia merupakan koloni Inggris. Australia menjadi negara saat federasi dari koloni-koloni yang terpisah terbentuk pada tanggal 1 Januari 1901. Dalam bidang politik, terdapat tiga partai besar yang cukup berkuasa yaitu Partai Buruh, Partai Liberal, Partai Nasional. Partai Buruh Australia (*Australian Labor Party-ALP*) adalah sebuah partai politik sayap kiri-tengah Australia. Partai Buruh Australia (*Australian Labor Party-ALP*) didirikan pada tahun 1891 dan merupakan partai politik tertua yang aktif dalam pemerintahan federal di negara tersebut. Partai Buruh Australia (ALP) adalah peserta pada pemilu 1901 yang diadakan sesaat setelah Federasi Australia terbentuk.

Politik luar negeri Australia sejak federasi 1901 sampai 1933 merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Pemerintah Kerajaan Inggris. Pemerintah Inggris mewakili dan memfasilitasi semua kepentingan

Australia dalam hubungan luar negerinya. Dalam hal pertahanan dan Keamanan, Australia dijamin oleh Inggris. Perdagangan luar negerinya yang utama berlangsung dengan Inggris. Pasca Perang Dunia II, Angkatan Bersenjata Inggris yang seharusnya mampu memposisikan diri sebagai pelindung bagi pertahanan Australia ternyata tidak mampu menahan serangan dan invasi Jepang di wilayah Pasifik. Invasi Jepang di kepulauan Pasifik membuat banyak warga Australia dan pemerintah Australia merasa tidak aman akan keadaan tersebut. Ini kemudian terbukti dengan berhasilnya tentara Jepang memasuki wilayah Australia. Rasa tidak aman dengan sendirinya memicu Australia untuk mencari kekuatan baru yang bisa melindungi dan membuat mereka merasa aman yang mana selama ini tidak mampu dilaksanakan oleh Inggris. Oleh karena itu Australia mencari perlindungan yang baru berupa kekuatan atau kekuasaan dari Amerika Serikat.

Setelah “terlepas” dari Inggris, pandangan strategis dan perencanaan pertahanan Australia dibentuk atas perubahan lingkungan internasional serta distribusi kekuatan global, khususnya keunggulan strategis Amerika Serikat. Amerika Serikat telah memainkan peran stabilitator di seluruh dunia dan khususnya di kawasan Asia-Pasifik. Hubungan pertahanan Australia dan Amerika Serikat yang sudah terjalin lama dan berlangsung harmonis, hal ini memberikan dampak bagi kebijakan pertahanan Australia. Artinya bahwa Amerika Serikat selalu menjadi dasar pilihan dalam setiap kebijakan pertahanan Australia.

“Ketergantungan” dengan Negara besar membawa Australia pada citra sebagai “pihak asing” di kawasan Asia.

Dalam hal perumusan kebijakan pertahanan, terdapat berbagai pilihan-pilihan utama yang selalu menjadi fokus perhatian dari setiap pemimpin Australia. *Pertama*, apakah Australia harus terus bergantung pada perlindungan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris, yang dinilai dapat memberikan jaminan keamanan bagi Australia. *Kedua* yaitu apakah Australia perlu membangun sistem pertahanan yang mandiri sehingga diharapkan dapat lebih aktif dalam upaya serta inisiatif di forum internasional. *Ketiga* yaitu apakah Australia harus bertarung diluar negeri yang berkaitan dengan konsep *Forward Defence* atau Australia harus berperang didalam negeri yang sesuai dengan konsep *Continental Defence*.

Pada tanggal 18 Oktober 1980, Bob Hawke terpilih ke Parlemen Federal sebagai wakil dari Partai Buruh Australia untuk Wills, Victoria konstituen. Ia memenangkan kursi ini dalam empat pemilu berturut-turut 1983, 1984, 1987 dan 1990. Pada bulan Maret 1983 pimpinan partai Buruh Bob Hawke menggantikan perdana menteri Fraser dari koalisi Partai non Buruh. Bob Hawke merumuskan kebijakan pertahanan dalam sebuah buku putih pertahanan Australia yang dikenal dengan *Defence White Paper 1987*. Pada masa itu, Bob Hawke melalui Beazley meminta Paul Dibb untuk meninjau isi, prioritas dan dasar pemikiran dari

perencanaan pertahanan yang ingin dirumuskannya dalam kebijakan pertahanan. Dalam laporannya, Dobb menolak konsep *Forward Defence* yang kerap menjadi strategi dasar kebijakan pertahanan Australia sebelumnya, Dobb menawarkan konsep *Continental Defence*. Konsep *Continental Defence* merupakan strategi kekuatan militer Australia harus dipersiapkan untuk menjaga dan mempertahankan benua Australia, atau benua Australia dan wilayah yang menjadi bagian dari kepentingan strategisnya, dan Australia tidak perlu melibatkan diri dalam berbagai perang di luar negeri. Bob Hawke menolak saran tersebut dan cenderung menganut konsep "*Forward Defence Within an Alliance*", yang artinya pertahanan dengan konsep garis depan yang didalamnya masih terdapat aliansi. Setelah kepemimpinan Bob Hawke, Australia dipimpin oleh Perdana menteri yang berasal dari Partai Buruh yaitu Paul Keating. Paul Keating mengadopsi kebijakan pertahanan *Defence White Paper 1987* era Bob Hawke. Kebijakan pertahanan Australia era Paul Keating dikenal dengan *Defending Australia 1994*. Bisa dikatakan tidak ada perubahan berarti dalam kebijakan pertahanan Australia era Paul Keating. *Defending Australia 1994* berisi tentang rancangan pertahanan yang masih tetap terpaku pada aliansi serta memperluas hubungan dengan Indonesia, yang dianggap merupakan bagian penting di kawasan. *Defending Australia 1994* era Paul Keating masih tetap terfokus pada aliansi dengan Amerika Serikat, sama halnya dengan kebijakan pertahanan era Bob Hawke. Hanya

saja dalam “alur pergerakan” keamanan, Australia “menilik” Indonesia sebagai bagian awal dalam tahap pendekatan terhadap kawasan.

Pada tanggal 3 Desember 2007, pemimpin Partai Buruh Kevin Rudd, dilantik sebagai Perdana Menteri Australia yang baru menggantikan John Howard. Kenaikannya sebagai Perdana Menteri Australia diharapkan bisa membawa harapan baru secara domestik maupun internasional. Kemenangan Partai Buruh itu sekaligus merupakan jawaban atas penantian selama sebelas tahun sejak kalahnya PM Paul Keating pada Pemilu 1996. Sejak akhir 2007, pemerintahan Kevin Rudd tengah menyusun buku putih pertahanan Australia 2009 yang baru untuk menggantikan buku putih pertahanan 2000 yang diterbitkan di era PM John Howard. Di dalam *Defence White Paper 2009* era Kevin Rudd, Australia menyatakan bahwa kebijakan pertahanan yang baru salah satunya adalah *Self-Reliance* yang intinya adalah kebijakan yang mengarah pada pertahanan kedaulatan dengan berdasarkan prinsip kemandirian. Berikut merupakan gambaran umum perbedaan yang diukur dari beberapa indikator, antara lain :

No.	Indikator	Defence white paper 1987	Defending Australia 1994	Defence White Paper 2009
1	Konsep	<i>Forward Defence</i>	<i>Forward defence</i>	<i>Self-Reliance</i>
2	Strategi	<i>Strategy in depth</i>	<i>Strategy in depth</i>	<i>Self-Reliance</i>
3	Sikap terhadap aliansi	Mendukung aliansi	Mendukung aliansi	Tidak mendukung (kemandirian)

4	Ancaman	konvensional	konvensional	non konvensional
5	Kepentingan strategis	Ancaman konvensional dan Wilayah teritori australia	Ancaman konvensional dan Wilayah teritori australia	Isu keamanan non konvensional dan kawasan asia pasifik

Dilihat dari beberapa indikator yang telah dipaparkan di atas, seperti substansi, tujuan, strategi, ancaman, fondasi atau dasar keinginan, konsep, sikap terhadap aliansi, serta kepentingan strategis. Maka *Defence White Paper 1987, 1994* dengan *Defence White Paper 2009* jelas tampak berbeda.

Hubungan pertahanan Australia dan Amerika Serikat yang sudah terjalin lama dan berlangsung harmonis, memberikan dampak bagi kebijakan pertahanan Australia. Artinya bahwa Amerika Serikat selalu menjadi dasar pilihan dalam setiap kebijakan pertahanan Australia. “Ketergantungan” dengan Negara besar membawa Australia pada citra sebagai “pihak asing” di kawasan Asia.

Partai Buruh menjunjung tinggi prinsip kemandirian. Partai Buruh terus menunjukkan akar bekerja lewat upaya-upaya dalam perjuangan kelasnya. Partai Buruh berorientasi pada keinginan dasar untuk memperbaiki nasib pekerja, dengan menggunakan metode sosialis untuk mencapai tujuan-tujuannya. Dalam perkembangannya, dasar ideologi sosialis ini terus mengalami pergeseran. Pergeseran yang dimaksud lebih

kepada upaya setiap anggota dalam memperjuangkan hak kaum buruh, sehingga tujuan ini kembali menjadi bahan perdebatan. Partai Buruh yang terbagi dari fraksi kiri, tengah, dan kanan kerap mendapat kritik dari oposisi karena kebijakan yang diambil dinilai “menyimpang” dari ideologi Partai. Sebagai contoh, kaum sosialis kiri memperjuangkan kepentingan dan hak-hak kaum buruh dengan cenderung membuka kran bagi kaum industrialis untuk bekerja sama. Mereka berpendapat bahwa Negara dapat dikelola dengan bebas untuk keuntungan terbaik dari kelas pekerja. Prinsip yang kerap melekat dari sosialis kiri adalah tentang keuntungan yang didapat dari kerjasama tersebut. Artinya bahwa ada pertimbangan nilai untung rugi yang selalu menjadi dasar pertimbangan dari kaum kiri. Selama menguntungkan dan selama kepentingan kaum buruh terpenuhi, ini tidak akan menjadi soal karena yang menjadi hal utama adalah perjuangan pemenuhan hak-hak kaum buruh. Perusahaan-perusahaan yang terindikasi menindas buruh itulah yang menjadi target, namun perusahaan-perusahaan yang memberi untung dianggap sebagai bagian dalam perjuangan. Ketika Australia dipimpin oleh Hawke-Keating, bagian yang menonjol adalah tentang kebijakan ekonomi yang selalu dinilai sedikit menyimpang dari unsur tradisionalis yang diperjuangkan oleh PM Buruh sebelumnya yaitu Whitlam. Hal ini terkait dengan Hawke-Keating yang berasal dari kaum kiri menerapkan kebijakan ekonomi yang dinilai cenderung membuka jalan bagi kaum industrialis serta cenderung mengandung unsur liberal. Dalam perdebatan tentang pengembalian nilai-

nilai perburuhan, akhirnya Emy dan Hughes meredefinisikan kembali makna perburuhan. Mereka berpendapat bahwa perburuhan bukanlah sesuatu hal yang selalu sama dengan sosialisme. Perburuhan adalah keberhasilan upaya pemimpin dalam memajukan kebijakan-kebijakan khusus yang bermanfaat bagi kelas buruh. Keberhasilan tersebut dilihat dari seberapa besar upaya setiap pemimpin dalam memperjuangkan jaminan sosial, pelayanan, jaminan kesehatan bagi kaum buruh. Perburuhan yang dimaksud menggabungkan elemen Workerism yang berpacu pada kesempatan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari sistem industrialis atas nama kepentingan kaum buruh, bukan berusaha mengubah dasar dari ideologi tersebut. Prinsip seperti ini memungkinkan kebebasan dari setiap pemimpin dalam menerapkan kebijakan yang dianggap tepat bagi kaum buruh asalkan alur yang ada selalu berujung pada peningkatan kesejahteraan buruh.

Kebijakan pertahanan yang diambil oleh Hawke-Keating tentang pentingnya aliansi dengan AS merupakan cerminan dari kaum sosialis kiri. Mereka mempertimbangkan nilai untung rugi dalam aliansi tersebut. Ini terkait dengan pola politik dagang sapi yang selalu menjadi salah satu predikat dalam sistem kepartaian Australia. Tanpa bermaksud mengabaikan ideologi partai yang menganut prinsip kemandirian, sebenarnya aliansi merupakan bentuk baru industrialis di bidang pertahanan. Perlindungan AS dirasa memberi jaminan keamanan bagi Australia. Jaminan keamanan membantu Hawke-Keating untuk lebih

fokus memperhatikan keadaan ekonomi Australia yang sedang dilanda krisis. Ketika pemulihan ekonomi tercapai, Australia dapat dengan mudah memperhatikan isu-isu lain yang nantinya bertujuan bagi perbaikan Australia yang lebih baik. Penulis melihat bahwa prinsip Hawke-Keating dalam kebijakan pertahanan mereka merupakan cara Hawke-Keating dalam memperjuangkan kepentingan Australia secara utuh. Keutuhan yang dimaksud penulis merupakan bagian dari upaya Hawke-Keating untuk merealisasikan makna perburuhan yang dipahami oleh kaum kiri. Pola pikir yang dianut Hawke-Keating sejajar dengan definisi perburuhan tersebut. Selama menguntungkan dan selama tujuan dari setiap keputusan yang diambil selalu bermuara pada kesejahteraan kaum buruh, maka hal tersebut dapat dimaklumi. Setelah Kepemimpinan Hawke-Keating, Partai Buruh menjadi pihak oposisi selama 11 tahun, karena pada tahun 1996, Australia dipimpin oleh John Howard dari pihak oposisi. Pada tahun 2007, Partai Buruh kembali “memainkan” peran dalam kursi kepemimpinan dengan terpilihnya Kevin Rudd sebagai PM Australia. Kebijakan pertahanan Australia era Kevin Rudd dikenal dengan *Defence White Paper 2009*. Berbeda dengan Hawke-Keating yang mengedepankan pertahanan dengan perlindungan Negara AS, Kevin Rudd tidak ingin bergantung pada aliansi. Kevin Rudd memilih konsep kemandirian sebagai bagian dari kebijakan pertahanan Australia. Kevin Rudd kembali mencerminkan gaya kepemimpinan Partai Buruh yang selalu ingin terlihat independen. Prinsip kemandirian dikaitkan dengan sejarah dan ideologi Partai Buruh yang

tidak pernah berkoalisi dengan partai lain baik ketika memerintah maupun menjadi pihak oposisi. Kevin Rudd yang berasal dari sosialis kanan merepresentasikan paham yang dianut kaumnya tentang kemandirian dan pengabaian hubungan dengan AS. Makna perburuhan yang dipahami oleh kaum kanan jelas berbeda dengan kaum kiri. Kaum kanan kerap mengabaikan hubungan dengan AS, bahkan bisa dikatakan sangat anti dengan AS. Pemikiran yang dipertahankan kaum kanan adalah menjunjung tinggi prinsip ideologi Partai Buruh dalam bentuk kemandirian. Terlepas dari segala tujuan yang ingin dicapai demi tujuan kesejahteraan, kaum kanan tidak ingin “mencoreng” kemandirian yang selama ini terukir lewat sejarah tentang keberadaan Partai Buruh.

Beberapa faktor yang mendukung adanya perbedaan kebijakan pertahanan Australia era Hawke-Keating dan Kevin Rudd antara lain, karena adanya perbedaan Fondasi dari Hawke-Keating dan Kevin Rudd meliputi persepsi dan situasi domestik Australia di bidang ekonomi serta adanya perubahan peran Amerika Serikat yang ditinjau dari bidang ekonomi dan militer. Keterkaitan faktor eksternal yang hanya mengakar pada *performance* Amerika Serikat sebenarnya dipilih sebagai bagian dari faktor sejarah Australia yang selalu melandaskan pertahanan pada pilihan-pilihan pada sandaran Negara-negara besar. Hawke-Keating berkeyakinan bahwa untuk dapat bertahan, Australia tidak dapat melakukannya sendiri, maka perlindungan Amerika Serikat sangat penting, sehingga posisi Amerika Serikat di depan dapat melindungi Australia. Dengan berlakunya

Forward Defence, maka Australia lebih mudah dalam menghadapi ancaman-ancaman potensial yang berpengaruh bagi kepentingan nasional dan keamanannya seperti komunisme, karena kekuatan-kekuatan besar yang menjadi sekutunya menempatkan diri sebagai pelindung Australia. Kevin Rudd melihat perubahan strategis lingkungan geopolitik Australia sebagai bagian yang penting yang tidak dapat diabaikan. Kondisi ekonomi Australia di era Kevin Rudd yang kuat dijadikan sebagai peluang dalam keyakinan mampu berdiri sendiri memunculkan ketegasan tentang tidak perlunya menggantungkan keamanan terhadap negara lain. Hal ini diperkuat dengan fakta melemahnya *performance* Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki peran tunggal dalam lingkungan internasional selama beberapa dekade. Faktor lain yaitu kondisi ekonomi AS tahun 2008, yang dilanda krisis. Bagaimana mungkin Australia harus menyandarkan diri pada aliansi keamanan dengan Amerika Serikat sedangkan dalam perkembangan di era Kevin Rudd, Amerika Serikat tengah diperhadapkan dengan berbagai macam permasalahan. Keyakinan itu semakin diperparah dengan melihat Amerika Serikat yang dulunya sangat "disegani" karena kekuatan militer, ekonomi, teknologi dan peran dalam berbagai permasalahan dunia, kini mulai bergeser dan merosot akibat munculnya kekuatan baru seperti Cina yang tidak dapat diabaikan. Cina memberikan tantangan yang signifikan secara ekonomi, militer dan politik tidak hanya bagi Asia Tenggara, tetapi secara tidak langsung hal ini merupakan ancaman bagi eksistensi Australia.